

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tahun 2023

Tribulan III

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662

LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan III dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2018 - 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 196600709 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah	2
D. Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perjanjian Kinerja.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah menuju terwujudnya good and clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 Tribuian III dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 83 sub kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran.

----- ooOoo -----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keuaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 Tribulan II merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah periode 2018-2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

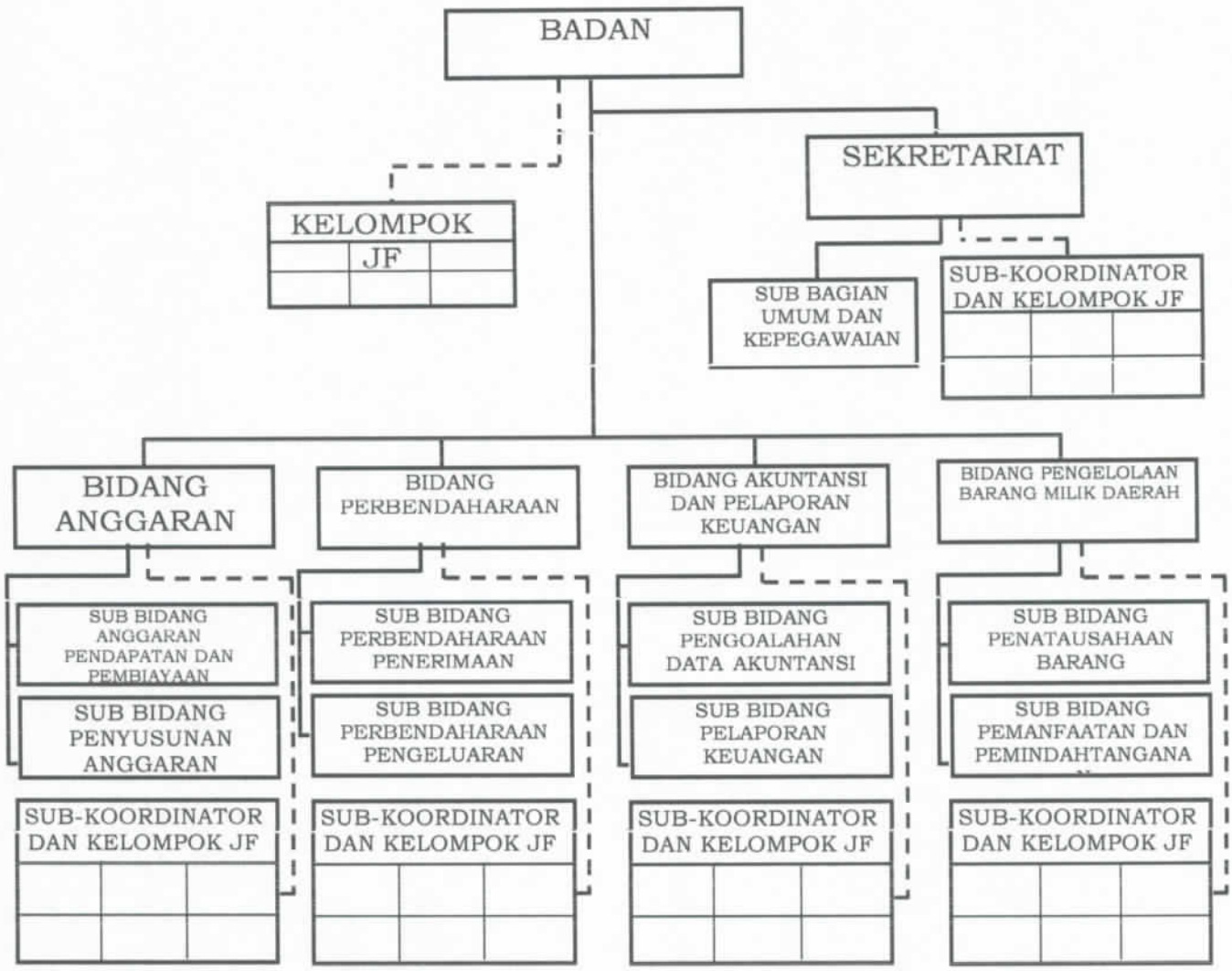
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**SRTRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



C.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang ada. Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak enam puluh tiga orang (PNS 31 orang dan TKB 30 orang). Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 13 Orang
 - b. Jabatan Fungsional : 3 Orang
 - c. Staf PNS : 15 Orang
 - d. TKB : 30 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 3 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 12 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 7 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : -Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : -Orang
 - f. SLTA : 8 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
 - a. Sarjana (S1) : 19 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : - Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
 - e. SLTA : 8 Orang
 - f. SLTP : 1 Orang
 - g. SD : - Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda(IV/c) : 1Orang
 - b. Pembina Tingkat I(IV/b) : 1 Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 2 Orang
 - d. Penata Tingkat I/ (III/d) : 8 Orang
 - e. Penata(III/c) : 2 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 5 Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 4 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 Orang

- i. Pengatur (II/c) : 5 Orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 Orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : - Orang
 - l. Juru Tingkat I (I/d) : - Orang
 - m. Juru (I/c) : - Orang
 - n. Juru muda Tingkat I (I/b) : - Orang
 - o. Juru muda (I/a) : - Orang
5. Tenaga Kerja Bulanan : 30 Orang

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan II disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - C.1 Organisasi Perangkat Daerah
 - C.2 Kepegawaian
- D. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB. IV PENUTUP

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan Indikator tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%

	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Sumber : Cascading Renstra Perubahan 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempertahankan Ketertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%
		4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2.	Mempertahankan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%
		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%
		3. Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%
		4. Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1 Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 117,376,484,279
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 378,935,318,986
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1,224,156,050
JUMLAH		Rp 497,535,959,315

2. Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang). Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%
9	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43,402,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 114,020,020,242
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp4,024,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp306,730,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,462,928,162
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp376,762,806
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp743,314,000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp419.303.069
9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 376,942,959,330
Jumlah		Rp 494,319,443,609

3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag). Sasaran yang digunakan menggambarkan output pada semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.

NO	SASARANSUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
2	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan
4	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan
5	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan
6	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp19,046,000
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp732,070,700
3	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp10,750,000
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp37,100,600
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp24,700,000
6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp39,783,750
	Jumlah	Rp863,451,050

4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf pelaksana dan fungsional. Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja semua pegawai/ staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen

2	Melaksanakan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3	Melaksanakan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen
4	Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

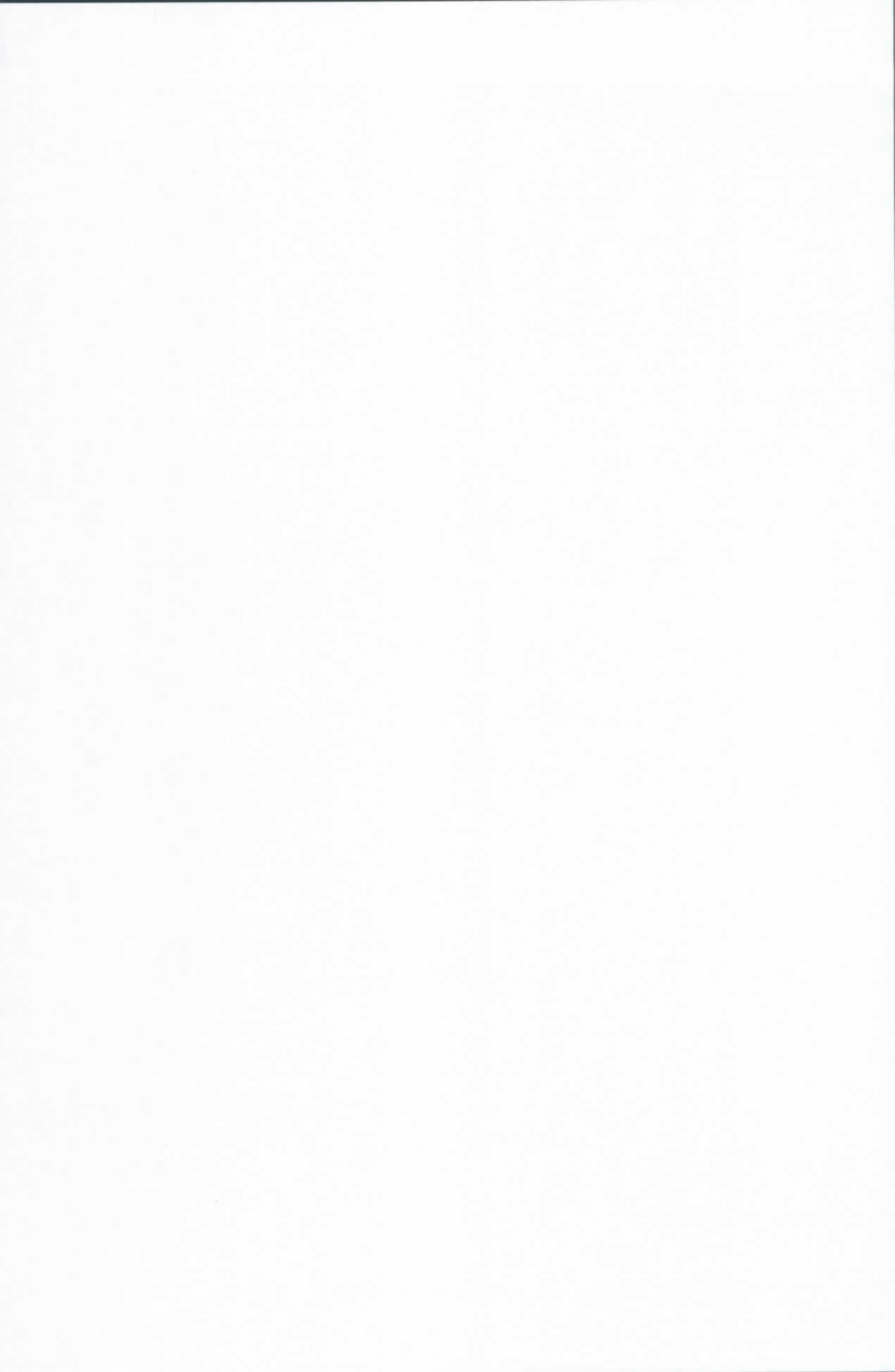
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 (RKPA)

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan progres organisasi. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.376.484.279
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.402.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.480.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.187.000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.683.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.596.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.458.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.020.020.242
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.211.038.242
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	592.632.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.030.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.033.000
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.173.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.024.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.024.000
4.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	306.730.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.400.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.840.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.200.000
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	186.260.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.462.928.162
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.600
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	494.667.499

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	523.202.563
4	Penyediaan Bahan/Material	4.460.500
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.770.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.762.806
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.762.806
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	115.000.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.314.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.450.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.364.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.303.069
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.598.800
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.704.269
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	378.935.318.986
1.	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.027.392.406
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.375.530
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.715.620
3.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	135.190.000
4.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.610.000
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	44.050.000
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.742.415
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	131.822.796



	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.714.965
9.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	76.926.000
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	117.300.000
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.660.000
12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	122.610.000
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14.675.000
2.	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	512.943.600
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	143.104.000
2.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.850.000
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.811.000
4.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.944.000
5.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	108.063.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.192.000
7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	67.263.000
8.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35.422.600
9.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.294.000
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	452.023.650
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	57.742.000

	Pengeluaran Kas Daerah	
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	66.510.000
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Tribulanan dan Semesteran	70.868.000
4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	174.038.650
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19.176.000
6.	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	23.975.000
7.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.064.000
8.	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36.650.000
4.	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	376.942.959.330
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	5.666.342.268
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	347.311.069.300
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.255.584.630
4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.709.963.132
5.	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	0
1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	0
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.224.156.050
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.224.156.050
1.	Penyusunan Standar Harga	76.205.000
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.865.000

3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.805.000
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.046.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	732.070.700
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	10.750.000
8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.819.000
9.	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	145.011.000
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.100.600
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.700.000
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39.783.750

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 Tribulan III akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	Opini BPK terhadap LKPD	WTP (atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020)

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK	IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2021) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 Tribulan II

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK	IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2022) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022..

Capaian kinerja untuk sasaran mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK dengan hasil IPKD dengan kategori Perlu Perbaikan (2022) WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan III ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023. diperoleh pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	2	3	4
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan. yakni awal bulan 	- Penyampaian Raperda tentang APBD TA. 2024 kepada DPRD Kabupaten Lumajang	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

	<p>Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100 % = melebihi waktu normal. penyusunan Raperda APBD tidak tepat waktu • Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal. penyusunan Raperda APBD tepat waktu <p>35 $\frac{35}{62} \times 100\% = 56\%$ (Tepat Waktu) 62 Waktu Riil = 1 Agustus 2023 s/d 5 September 2023 = 35 hari</p>	pada tanggal 5 September 2023.	
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil}}{\text{Jumlah waktu normal}} \times 100\%$ <p>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD 2 bulan yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 bulan September • Nilai > 100 % = melebihi waktu normal. penyusunan Raperda P-APBD tidak tepat waktu • Nilai ≤ 100 % = kurang/ sama dengan waktu normal. penyusunan Raperda perubahan APBD tepat waktu. <p>12 $\frac{12}{76} \times 100\% = 15,79\%$ (Tepat Waktu) 76 Waktu Riil = 7 Agustus 2023 s/d 18 Agustus 2023 = 12 hari</p>	- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2023 kepada DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 16 Agustus 2023.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-	<p>Jumlah waktu riil penyampaian LKPD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil}}{\text{Jumlah waktu normal}} \times 100\%$ <p>Jumlah waktu normal penyampaian LKPD</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai > 100%. maka hal dimaksud berarti 	Berita Acara Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kab. Lumajang TA. 2021 Tanggal 24 Maret 2022	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

RI	<p>melebihi waktu normal penyampaian LKPD. sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai $\leq 100\%$. maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD. sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>Perhitungan :</p> <p>83</p> <p>$\times 100\% = 92\%$ (Tepat Waktu)</p> <p>90</p> <p>Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 24 Maret 2022 = 83 hari</p>		
<p>4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD</p>	<p>Jumlah waktu riil penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> <p style="text-align: center;">————— $\times 100\%$</p> <p>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai $> 100\%$. maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD. sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. • Nilai $\leq 100\%$. maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD. sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>Perhitungan :</p> <p>149</p> <p>$\times 100\% = 82.7\%$ (Tepat Waktu)</p> <p>180</p> <p>Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 29 Mei 2022 = 149 hari</p>	<p>- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Nomor 900/218/427.7/3/2023 tanggal 29 Mei 2023</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan III :

N O	Indikato Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	100%	100%	803.609.406	471.066.914	58,61%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	100%	100%	223.783.000	73.401.420	32,80%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%	496.056.543.259	282.888.065.133	57,02%
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	452.023.650	298.658.750	66,07%
Capaian				100%	497.535.959.315	283.731.192.217	57,02%

B. REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHANN

Pada tahun 2023 jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 553.431.097.550, pada Tribulan III terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran dengan jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 497.535.959.315

(berkurang sebesar Rp. 55.895.138.235). Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp. 283.731.192.217 atau sebesar 57%. Secara detail penyerapan anggaran tahun 2023 Tribulan III tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	
1	BELANJA LANGSUNG	553,431,097,550	497,535,959,315			283,731,192,217		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119,610,616,149	117,376,484,279	100%		26,600,824,574		100%
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,264,000	43,402,000	100%		30,930,375		83%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000	3,480,000	2	Dokumen	3,358,500	2	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3,187,000	3,187,000	1	Dokumen	-	0	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,998,000	7,998,000	4	Dokumen	6,975,000	4	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	2,000,000	1	Dokumen	1,956,000	1	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,025,000	6,683,000	4	Dokumen	3,181,500	4	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,596,000	7,596,000	4	Laporan	5,483,000	3	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,458,000	12,458,000	13	Laporan	9,976,375	10	Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115,639,901,301	114,020,020,242			24,187,373,596		100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114,815,137,501	113,211,038,242	1,085	ASN	23,628,736,196	306	Orang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635,476,800	592,632,000	12	Dokumen	415,082,400	9	Dokumen
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155,390,000	180,030,000	12	Dokumen	114,122,000	9	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,033,000	5,033,000	5	Laporan	4,951,000	5	Laporan
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23,114,000	23,114,000	2	Dokumen	20,527,000	2	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,750,000	8,173,000	14	Laporan	3,955,000	11	Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,024,000	4,024,000			2,758,000		100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,000,000	2,000,000	2	Dokumen	1,048,000	2	Dokumen
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,024,000	2,024,000	2	Laporan	1,710,000	2	Laporan
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	66,530,000	306,730,000		100%	42,639,125		100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,400,000	22,400,000	1	Paket	22,400,000	1	Paket
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,030,000	2,030,000	12	Dokumen	922,000	6	Dokumen
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,840,000	7,840,000	2	Dokumen	6,200,000	2	Dokumen
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17,300,000	88,200,000	66	Orang	10,080,000	3	Orang
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16,960,000	186,260,000	22	Orang	3,037,125	2	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,471,852,774	1,462,928,162		100%	1,262,092,800		100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencanangan Danganan Kantor	9,724,300	3,137,600	8	Paket	2,497,000	12	Paket
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523,639,661	494,667,499	4	Paket	484,632,115	4	Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	539,191,063	523,202,563	2	Paket	521,067,400	2	Paket
4	Penyediaan Bahan/Material	7,503,750	4,460,500	2	Paket	1,955,000	2	Paket
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	31,250,000	12	Laporan	22,130,700	9	Laporan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354,354,000	398,770,000	12	Laporan	223,885,585	9	Laporan
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7,440,000	7,440,000	4	Dokumen	5,925,000	3	Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916,051,274	376,762,806		100%	360,427,550		89%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816,051,274	261,762,806	7	Unit	260,527,550	7	Unit
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100,000,000	115,000,000	2	Unit	90,000,000	1	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777,974,000	743,314,000		100%	533,025,456		100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,510,000	1,500,000	12	Laporan	568,147	9	Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432,100,000	411,450,000	12	Laporan	288,108,502	9	Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330,364,000	330,364,000	12	Laporan	244,348,807	9	Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,018,800	419,303,069		100%	181,577,672		100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169,798,800	111,598,800	37	Unit	78,878,772	4	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62,750,000	177,704,269	57	Unit	47,258,900	28	Unit
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	260,000,000	130,000,000	2	Aplikasi	55,440,000	1	Aplikasi
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197,470,000	-	-		-	-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	432,254,512,611	378,935,318,986		100%	256,830,407,643		100%
1	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,053,700,077	1,027,392,406		100%	544,468,334		62%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35,675,530	35,375,530	2	Dokumen	8,185,000	-	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50,015,620	49,715,620	2	Dokumen	40,621,420	2	Dokumen
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	144,380,000	135,190,000	5	Dokumen	37,920,000	3	Dokumen
4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41,810,000	43,610,000	2	Dokumen	25,690,000	1	Dokumen
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	76,363,290	44,050,080	4	Dokumen	41,573,892	3	Dokumen
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34,478,130	34,742,415	2	Dokumen	-	-	Dokumen
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Ke pala Daerah tentang Penjabaran APBD	136,534,042	131,822,796	5	Dokumen	68,618,022	3	Dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80,147,465	95,714,965	2	Dokumen	7,090,000	-	Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	76,926,000	76,926,000	2	Dokumen	69,330,000	-	Dokumen
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	114,500,000	117,300,000	12	Dokumen	92,400,000	9	Dokumen
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	114,800,000	125,660,000	12	Dokumen	86,760,000	9	Dokumen
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	127,670,000	122,610,000	5	Dokumen	60,380,000	-	Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20,400,000	14,675,000	500	Orang	5,900,000	250	Orang
2	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	603,676,600	512,943,600		100%	282,778,528		94%
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	114,879,000	143,104,000	22,000	Dokumen	87,635,000	16,462	Dokumen
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,850,000	4,850,000	1	Laporan	4,441,000	1	Laporan
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5,811,000	5,811,000	4	Dokumen	2,272,000	2	Dokumen
4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4,944,000	4,944,000	1	Dokumen	2,487,000	-	Dokumen
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105,102,000	108,063,000	25	Dokumen	67,179,000	19	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyectoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66,360,000	76,192,000	96	Laporan	50,299,000	72	Laporan
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	44,535,000	67,263,000	10	Dokumen	37,090,528	6	Dokumen
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	32,722,600	35,422,600	1	Dokumen	-	-	Dokumen
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	224,473,000	67,294,000	348	Orang	31,375,000	230	Orang
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	526,993,650	452,023,650		100%	298,658,750		100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48,514,000	57,742,000	12	Laporan	38,402,000	9	Laporan
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36,000,000	66,510,000	1,164	Dokumen	31,650,000	828	Dokumen
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Tribulanan dan Semesteran	30,960,000	70,868,000	137	Laporan	20,874,000	122	Laporan
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	174,038,650	174,038,650	2	Laporan	172,533,250	2	Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19,176,000	19,176,000	2	Dokumen	18,999,500	2	Dokumen
6	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26,525,000	23,975,000	1	Dokumen	16,200,000	1	Dokumen
7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3,064,000	3,064,000	1	Dokumen	-	1	Dokumen
8	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	188,716,000	36,650,000	392	Orang	-	-	Orang
4	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	430,014,642,284	376,942,959,330		100%	255,704,502,031		100%
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	5,666,342,268	5,666,342,268	12	Laporan	4,648,543,043	9	Laporan
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	346,893,903,200	347,311,069,300	12	Laporan	235,481,538,713	9	Laporan
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	70,000,000,000	16,255,584,630	12	Laporan	10,663,638,220	9	Laporan
4	<u>Pengelolaan Dana Bagi Hasil</u> Kabupaten/Kota	7,454,396,816	7,709,963,132	2	Laporan	4,910,782,055	2	Laporan
5	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	55,500,000	-		0%	-		0
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	55,500,000	-		0	-		0
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,565,968,790	1,224,156,050		100%	299,960,000		100%
1	<u>Pengelolaan Barang Milik Daerah</u>	1,565,968,790	1,224,156,050		100%	299,960,000		100%
1	Penyusunan Standar Harga	202,505,000	76,205,000	1	Dokumen	51,246,000	1	Dokumen
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	51,865,000	51,865,000	1	Dokumen	-	-	Dokumen
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	76,330,000	69,805,000	2	Dokumen	13,930,000	1	Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		REALISASI KINERJA	
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26,905,000	-		0		-		0
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19,046,000	19,046,000	1	Laporan	14,694,000	1		Dokumen
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	828,432,440	732,070,700	1	Laporan	114,824,000	-		Laporan
7	Penilaian Barang Milik Daerah	10,750,000	10,750,000	1	Laporan	-	-		Laporan
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23,605,000	17,819,000	8	Laporan	6,082,000	3		Laporan
9	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170,521,000	145,011,000	20	Dokumen	56,520,000	26		Dokumen
10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37,100,600	37,100,600	3	Laporan	17,974,000	3		Laporan
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24,700,000	24,700,000	1	Laporan	24,690,000	1		Laporan
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94,208,750	39,783,750	65	Orang	-	-		Orang

B.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan III dibandingkan dengan target Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023 (sampai tribulan III)
Memperhatikan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%



	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%
--	--	------	------

B.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2018-2023 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023. disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum masuk dalam kategori sangat baik. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001